



Modal Sosial Pengelolaan Pariwisata Kota Kendari

INFO PENULIS **INFO ARTIKEL**

Abdul Nashar ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 3, No. 3, Desember 2023
abdulnashar99@yahoo.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Siti Jawiah
Universitas Sulawesi Tenggara
Siti_jawiah@gmail.com

Joko Tri Brata
Universitas Sulawesi Tenggara
joko_tribrata@yahoo.co.id

Nonia Sakka Lebang
Universitas Sulawesi Tenggara
Nonia_lebang@gmail.com

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nashar, A., Jawiah, S., Brata, J. T., & Lebang, N. S. (2023). Modal Sosial Pengelolaan Pariwisata Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3 (3), 213-222.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Modal Sosial dalam Pengelolaan Pariwisata di Kota Kendari. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah beberapa dokumen yang berkaitan dengan modal sosial dan Pariwisata di Kota Kendari. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan pariwisata dapat dan akan lebih baik jika dilaksanakan dengan penguatan pada modal sosial yang bertumpu pada Tiga unsur utama dalam modal sosial yakni ; mutual trust (saling percaya), reciprocity (hubungan timbal balik), dan jaringan sosial (networking). Modal sosial merujuk pada norma-norma, jaringan dan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat melalui: 1. Sharing information (berbagi informasi), 2. Coordinating activities (mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas) dan 3. Peran antar anggota kelompok dalam membuat keputusan bersama. Bentuk Modal sosial dalam sosial Mapping adalah : 1. Social bounding (perekat sosial), 2. Social bridging (jembatan sosial), dan 3. Social linking (hubungan/jaringan sosial).

Kata Kunci: Modal Sosial, Pengelolaan, Pariwisata

Abstract

The aim of this research is to determine the description of social capital in tourism management in Kendari City. The data used is secondary data obtained from the results of reviewing several documents related to social capital and tourism in Kendari City. The research results illustrate that tourism management can and will be better if implemented by strengthening social capital which relies on three main elements in social capital, namely; mutual trust (mutual trust), reciprocity (reciprocal relationships), and social networks (networking). Social capital refers to norms, networks and organizations that relate to society through: 1. Sharing information, 2. Coordinating activities (coordinating activities) and 3. The role of group members in making joint decisions. The forms of social capital in social mapping are: 1. Social bounding (social glue), 2. Social bridging (social bridges), and 3. Social linking (social relationships/networks)

Keywords: Social Capital, Management, Tourism.

A. Pendahuluan

Tujuan pembangunan pada hakikatnya pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan, sementara itu, implementasi pembangunan nasional yang terangkum dalam agenda pemerintah baik pusat maupun daerah masih dirasa kurang efektif dalam mencapai cita-cita tersebut. Bagi Indonesia, salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, nampaknya hal itu sulit dicapai melihat fakta lemahnya partisipasi masyarakat dalam aktifitas politik menjadi bukti melemahnya kapasitas masyarakat akibat agenda pembangunan yang tidak inklusif

Di tengah dinamika ekonomi global yang terus-menerus berubah dengan akselerasi yang semakin tinggi, Indonesia mengalami terpaan badai krisis yang intensitasnya telah sampai pada keadaan yang nyaris menuju kebangkrutan ekonomi. Hal ini diperparah dengan kehadiran liberisasi dalam perdagangan persaingan Internasional yang semakin ketat dan mekanisme pasar bebas yang semakin terbuka, turut membawa dampak negatif bagi industri-industri baik non rumah tangga dan rumah tangga, Untuk meminimalisir degradasi ini, maka kemampuan masyarakat secara umum harus dibangkitkan baik secara ekonomi maupun sosial, agar terjaga keberlangsungan kehidupan untuk mencapai tujuan bangsa.

Salah satu yang masih sarat dipunyai oleh bangsa Indonesia saat ini adalah modal sosial, dimana rujukan modal sosial menunjuk pada nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat.

Pemetaan kapasitas masyarakat dapat juga dilakukan dengan Social mapping atau pemetaan sosial, karena kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan peta sosial masyarakat. Peta sosial masyarakat inilah yang kadang salah diartikan oleh kita semua. Kita sering mengabaikan kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai, norma dan lain sebagainya dalam masyarakat. Kita hanya menganggap pemetaan sosial itu hanya untuk mengetahui tokoh-tokoh kunci saja dalam masyarakat, atau tempat-tempat berkumpul masyarakat, atau kebiasaan-kebiasaan yang tampak secara kasat mata saja. Tapi, kita tidak memetakan lebih dalam, bagaimana sebenarnya kebudayaan masyarakat yang akan kita masuki

Secara histori dianalogi bahwa penataan kawasan kumuh di Kota Kendari merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keadaan lingkungan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Kawasan kumuh yang terus memburuk dan tata ruang yang belum baik menjadi hambatan dalam membangun kota Kendari menjadi lebih baik dan menarik bagi wisatawan. Rendahnya minat wisatawan menjadi salah satu indikasi bahwa kawasan kumuh belum teratasi dan belum memiliki daya tarik yang baik bagi wisatawan. Pemerintah juga memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh dan mengembangkan kawasan wisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam konteks itulah, maka pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan melakukan

perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan (Sutrisno, 2008). Pariwisata dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000 dalam Joko Tri Brata, 2023). Sedangkan, menurut Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.

Pembangunan Kepariwisata di daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang terkait dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Bahkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.

Sosial Mapping

Pemetaan sosial dilakukan dengan berdasarkan pada Modal sosial, dimana modal sosial merupakan sesuatu rangkaian proses hubungan sosial antara individu maupun antara kelompok yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lain seperti saling percaya guna melakukan kerjasama demi meraih tujuan atau kepentingan bersama. tingginya nilai modal sosial yang dimiliki pada suatu daerah dapat membantu petani dalam hal produksi, distribusi dan inovasi. Misalnya apabila petani mengikuti kelompok tani, kemudian ketika kelompok tani tersebut mempunyai alat bajak untuk kepentingan kelompok, petani tersebut dapat dengan mudah memanfaatkan uang sewa alat bajak untuk keperluan lain, hal tersebut mengatakan bahwa modal sosial dapat mengurangi biaya tetap (fixed cost), (Colemena, 2009 dalam Sawitri dan Soepriadi, 2014). Pratisthita (2014) mengemukakan pendapatnya bahwa modal sosial adalah segala sesuatu yang membuat masyarakat bergabung untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Keberadaan unsur-unsur modal sosial ini secara tidak disadari telah menjadi kekuatan bagi kelompok mereka agar tetap bertahan menghadapi dinamika dalam kelompok.

Adam Smith dan kawan-kawan dalam kajian ekonomi memasukkan unsur modal sosial yang mereka sebut sebagai "social contract", yang memiliki unsur penting berupa karakteristik jaringan sosial, pola-pola imbal balik dan kewajiban- kewajiban bersama.

Lyda Judson Hanifan (1916,1920) memiliki kajian tentang suatu unit sosial yang didalamnya berlangsung pola-pola hubungan timbal-balik yang didasari oleh prinsip-prinsip kebajikan bersama (social virtues), simpati dan empati serta tingkat kohesifitas hubungan antar individu dalam kelompok (social cohesivity). Semua ini telah mengilhami kajian modern tentang modal sosial dengan tokoh besar yaitu, Robert D.Putnam, James C. Coleman, Francis Fukuyama dan Pierre Bourdieu. Konsep modal sosial pertama kalinya diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu pada awal 1980-an, yang mengartikan: Modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik aktual maupun potensial yang dapat dimiliki seseorang berkat adanya jaringan hubungan secara kelembagaan yang terpelihara dengan baik (Kristina;2003).

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari dengan menelaah beberapa dokumen yang terkait Modal Sosial dalam pengelolaan pariwisata, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk dokumen perencanaan dan beberapa dokumen pelaksanaan kebijakan pengelolaan pariwisata dan pendalaman melalui wawancara pada key informasion, , dengan analisis melalui analisa deskriptif kualitatif.

Untuk strategi pengembangan pariwisata, dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dari berbagai sumber, yang berguna untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan pariwisata dengan berpedoman pada kemampuan masyarakat dalam bentuk modal sosial.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kota Kendari merupakan merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai berbagai macam wisata yang menarik mulai dari wisata religi, wisata sejarah, wisata alam, wisata pantai, dan lain sebagainya. Hal tersebut terus dipertahankan oleh pemerintah daerah. Pariwisata bagi pemerintah daerah merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh La Ode Mohamadin (2011) menunjukkan bahwa: Strategi pengembangan pariwisata di Kota Kendari dilakukan melalui pengembangan produk wisata., baik pengembangan wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus. Di samping itu. dilakukan srategi pengembangan promosi dan pemasaran daJam negeri dan luar negeri, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan investasi, dan strategi pengelolaan lingkungan hidup guna menjamin pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yang dilanjtkan dengan penggambaran data Pariwisata Kota Kendari.

Tabel 01 ; Destinasi Wisata di Kota Kendari pada saat ini ada berbagai macam

Objek Wisata <i>Tourism Site</i>	Lokasi <i>Location</i>	Daya Tarik <i>Attractiveness</i>
1. Pantai Nambo	Kel. Nambo	Laut dan Terumbu Karang
2. Water Boom	Kel. Bonggoeya	Permainan Air
3. Water park	Kel. Anduonohu	Permainan Air
4. Pemancingan Matabubu	Kel. Matabubu	Kolam Ikan Air Tawar
5. Air Terjun Nanga-Nanga	Kel. Mokoau	Kebun Raya dan Pesona Hutan
6. Air Terjun Amarilis	Kel. Watu-Watu	Air Terjun
7. Air Terjun Alolama	Kel. Alolama	Tahura Murhum
8. N.S Valley	Kel. Anduonohu	Sarana Outbond dan Kolam
9. Tracking Mangrove Bungkutoko	Kel. Bungkutoko	Wisata Alam Mangrove
10. Pantai Mayaria	Kel. Kessilampe	Wisata Pantai

Sumber : Data BPS Kota Kendari, 2022

Dalam pengelolaan pariwisata, bahasan lain yang penulis paparkan adalah bahwa salah satu indikator dalam keberhasilan adalah dengan melalui Pendekatan modern yang berkaitan dengan capacity building. Capacity building ini mejadi inti dasar pada pemetaan sosial, dimana adalah bagaimana intensitas kelembagaan yang memiliki peran yang sangat penting didalam penataan kawasan kumuh karena pada dasarnya menata sebuah kawasan terlebih lagi kawasan kumuh bukanlah sekedar aktivitas teknis, estetik tetapi juga melibatkan proses sosial yang rumit dan unik.

Dalam konteks pariwisata, istilah wisatawan adalaah seseorang yang melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan (Sutrisno, 2008 dalam Joko Tri Brata, 2023). Pariwisata dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Sedangkan, menurut Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian

dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah (Pendit, 2004). Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara.

Pembangunan Kepariwisata di daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang terkait dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Bahkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.

Pembahasan

a. Unsur Utama dalam Modal Sosial

Seperti dikatakan bahwa jika merujuk pada penguatan modal sosial, maka konsep Civil Society yang lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat, berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Tri Brata (2023) menggambarkan bahwa ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarki-absolut dan ortodoksi gereja (Larry Diamond, 2003: 278), dimana Ernest Gellner (1995), Civil Society atau Masyarakat Madani merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.

Dalam konteks inilah, maka modal sosial sangat diperlukan, dimana Supono (2011) menjelaskan Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah mutual trust (saling percaya), reciprocity (hubungan timbal balik), dan jaringan sosial (networking). Ketiga unsur tersebut sangat berperan penting dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan karena setiap penyuluhan yang baik dapat tercipta karena adanya komunikasi yang baik antara kelompok tani. Jaringan sosial merupakan bentuk ketiga dari modal sosial.

1. Saling Percaya (Mutual Trust)

Saling percaya adalah unsur terpenting dalam modal sosial yang dibentuk secara sengaja sebagai awal dari terbangunnya suatu ikatan sosial yang muncul di antara dua orang atau lebih untuk saling berhubungan. Ngangi (2016) mengatakan bahwa rasa percaya dan dipercaya dianggap sebagai suatu hal yang dapat melicinkan kehidupan sosial. Bersikap jujur, transparan dan tidak menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tulus dalam kata-kata dan sikap, bisa menerima kritik dan saran dari orang lain adalah contoh kecil yang bisa membangun kepercayaan dalam suatu kelompok. Moorman (1993) mendefinisikan saling percaya (mutual trust) sebagai kesediaan (willingness) individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (confidence) kepada pihak lain. Menurut Pretty (2001), terdapat 2 (dua) macam kepercayaan, diantaranya kepercayaan terhadap individu yang kita mengenalnya dan kepercayaan terhadap orang yang kita tidak ketahui. Namun, akan meningkat karena kenyamanan kita dalam pengetahuan struktur sosial. Saling percaya terhadap yang lain dalam sebuah komunitas memiliki harapan yang lebih baik untuk dapat berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan. Sikap saling percaya juga merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk melakukan kerjasamayang dapat dikatakan sebagai pelicin kehidupan sosial.

Indra (2008) memberikan gambaran untuk mengukur tingkat kepercayaan dalam masyarakat diantaranya (1) seberapa besar tingkat kepercayaan terhadap sesama di lingkungan permukiman yang sama; (2) seberapa besar tingkat kepercayaan dalam hal pergaulan antar sesama dalam satu lingkungan permukiman; (3) seberapa besar tingkat kepercayaan dalam hal menolong antar sesama dalam satu lingkungan permukiman; dan (4) seberapa besar tingkat kepercayaan dalam hal pinjam meminjam uang dalam satu lingkungan permukiman. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana seseorang memiliki perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan bertindak dalam suatu tindakan yang mendukung. Kepercayaan antara dua orang atau lebih meliputi: (1) Ada saling percaya antar sesama anggota kelompok. (2) Ada saling percaya antar kelompok tani dengan kelompok tani yang lain. (3) Ada saling percaya antara kelompok tani dengan penyuluh.

2. Timbal Balik (Reciprocity)

Secara sederhana resiprositas adalah pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok (Polanyi, 1998). Reciprocity (timbal balik), dapat dijumpai dalam bentuk memberi, saling menerima dan saling membantu yang dapat muncul dari interaksi sosial (Soetomo, 2006).

Modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu-individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi (Hasbullah, 2006). Modal sosial selalu bercirikan saling tukar kebaikan (reciprocity) antar individu dalam suatu kelompok ataupun antar kelompok dalam suatu masyarakat. Reciprocity ini bukanlah suatu bentuk pertukaran seketika seperti halnya proses jual-beli, akan tetapi lebih bernuansa altruisme (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Pada masyarakat atau pada kelompok sosial yang memiliki bobot resiprositas kuat, akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial tinggi (kuat). Hal tersebut tergambarkan dengan tingginya tingkat kepedulian sosial, sikap saling membantu dan saling memperhatikan satu sama lain. Hubungan timbal balik adalah kecenderungan saling tukar menukar kebaikan. Tukar menukar kebaikan bisa dalam bentuk kepedulian sosial, saling memperhatikan dan saling membantu. Hubungan timbal balik dapat terjadi karena adanya dorongan oleh nilai dan norma didalam diri masyarakat (Hasbullah, 2006). Timbal balik meliputi: (1) Tingkat Kepedulian Sosial; peka terhadap kebutuhan anggota kelompok dan peka terhadap kebutuhan kelompok lain. (2) Sikap Saling Membantu; saling membantu dalam kelompok dan saling membantu dengan kelompok lain. (3) Sikap Saling Memperhatikan; saling mendorong antar sesama anggota kelompok kearah yang lebih baik, saling mendorong antara kelompok tani dengan kelompok tani lain, dan saling melindungi satu sama lain.

3. Jaringan Sosial

Jaringan sosial yakni sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan civic engagement. Jaringan ini bisa dibentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dan lain-lain. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut (Pratikno, 2008). Jaringan adalah sebuah pola koneksi dalam hubungan sosial individu dan kelompok untuk menyatukan diri dalam hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Mawardi (2007), modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu melainkan akan terletak pada kecenderungannya yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Modal sosial terletak

pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Jaringan sosial terjadi berkat adanya keterkaitan individu dan komunitas. Keterkaitan terwujud di dalam beragam tipe kelompok pada tingkat lokal maupun di tingkat yang lebih tinggi. Jaringan sosial yang kuat antara sesama anggota kelompok mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan. Apalagi jika kelompok sosial itu mampu menciptakan hubungan yang akrab antar sesamanya. Oleh karena itu, menurut Putnam (1995) bahwa jaringan sosial dapat dianggap penting dalam pembentukan modal sosial. Adanya jaringan-jaringan hubungan sosial antara individu dalam modal sosial memberikan manfaat dalam konteks pengelolaan sumber daya milik bersama karena mempermudah koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan yang bersifat timbal balik.

Menurut Hasbullah (2006), jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Pada kelompok sosial yang biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (lineage), pengalaman-pengalaman sosial turun-temurun (repeated social experiences) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (religious beliefs) cenderung memiliki kohesitas tingkat, tetapi rentang jaringan maupun trust yang terbangun sangat sempit. Sebaliknya, pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan kelompok dan memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat secara luas. Melalui jaringan, orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah. Jaringan adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam pembentukan kepercayaan. Jaringan yang dibahas dalam modal sosial adalah jaringan yang menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan peretasan masalah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

b. Peran Modal Sosial

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul 'The Rural School Community Centre' (Hanifan, 1916:130) yang di rujuk oleh Joko Tri Brata (2023) Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Sekalipun Hanifan telah menggunakan istilah modal sosial hampir seabad yang lalu, istilah tersebut baru mulai dikenal di dunia akademis sejak akhir tahun 1980an. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul "The Forms of Capital" (1986) mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial. Bourdieu menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial, dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan.

Modal sosial secara umum merujuk pada norma-norma, jaringan dan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat dalam memperoleh akses kekuasaan dan sumber daya serta pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Sehingga Grootaert (2004) menekankan peran penting dari adanya perkumpulan/ asosiasi lokal, yang pada prinsipnya berperan melalui tiga cara yaitu: 1. Sharing information (berbagi informasi) yaitu dimana institusi-institusi formal dan informal dapat membantu mencegah kegagalan pasar terkait dengan ketidakcukupan dan ketidaktepatan informasi. Dalam konteks ini institusi-institusi dapat membantu menyebarluaskan informasi yang cukup dan tepat, yang memungkinkan para pelaku pasar untuk membuat keputusan-keputusan yang cocok dan efisien. 2. Coordinating activities (mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas) dimana perilaku yang tidak terkoordinasi atau petualangan yang dilakukan oleh para agen ekonomi, dapat pula menyebabkan kegagalan pasar. Merujuk pada pengalaman proyek-proyek, tampaknya perilaku dimaksud muncul sebagai akibat kurangnya kekuatan institusi sosial baik formal maupun informal dalam rangka mengatur kesepakatan secara adil. 3. Making collective decisions (membuat keputusan-keputusan bersama) dimana pembuatan keputusan bersama adalah kondisi yang diperlukan bagi penyediaan barang-barang publik dan pengelolaan eksternalitas pasar. Tidak berbeda dengan pemerintah, asosiasi-asosiasi lokal dan yang bersifat sukarela pun tidak selalu efektif dalam memaksimalkan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan bersama. Dalam konteks ini, asosiasi-asosiasi tersebut tidak semata-mata tergantung dari bagaimana mereka mengatasi persoalan information-sharing, tetapi juga pada derajat keadilan yang tersedia. Institusi-institusi tindakan kerja sama bilamana aset-aset didistribusikan secara relatif adil dan keuntungan dapat dibagi secara merata (Grootaert, 2004).

c. Bentuk-Bentuk Modal Sosial

Dimensi lain yang terkait dengan modal sosial adalah tipologi atau bentuk modal sosial menurut Wolcock dalam Joko Tri Brata (2023) menyebutkan tiga bentuk modal sosial, yaitu : 1. Social bounding (perekat sosial) nilai, kultur, persepsi, dan tradisi atau adat-istiadat. Social bounding adalah, bentuk modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem masyarakat. Misalnya rasa kekerabatan yaitu menyebabkan adanya rasa empati/ kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik kebudayaan yang mereka percaya. Contohnya hubungan sosial penyuluh sesama penyuluh. 2. Social bridging (jembatan sosial), bisa berupa institusi maupun mekanisme. sosial bridging merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan disekitarnya, sehingga mereka memutuskan untuk membangun kekuatan kelemahan. Social bridging bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum sebagai warga negara, asosiasi, dan jaringan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar masyarakat mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang memiliki baik SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) dapat dicapai. Kapasitas modal sosial termanifestasikan dalam ketiga bentuk modal sosial tersebut (nilai, institusi, dan mekanisme) yang dapat memfasilitasi dan menjadi arena dalam hubungan antarwarga, antarkelompok agar mampu mengembangkan modal sosial untuk membangun integrasi sosial. Contohnya hubungan sosial antara kelompok tani yang satu dengan kelompok tani lainnya. 3. Social linking (hubungan/jaringan sosial) merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Contohnya hubungan sosial antara penyuluh dengan kelompok tani. Pada dasarnya ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari keadaannya. Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus penghambatan dalam ikatan sosial tergantung bagaimana individu dan masyarakat.

Dengan demikian, untuk pengelolaan pariwisata, ketiga bentuk modal sosial itu dapat dilakukan agar kebijakan pengembangan pariwisata dapat lebih efektif.

D. Kesimpulan

Hasil analisis memberikan kesimpulan sebagai berikut ; Tiga unsur utama dalam modal sosial dalam upaya pengelolaan pariwisata adalah mutual trust (saling percaya), reciprocity (hubungan timbal balik), dan jaringan sosial (networking). Ketiga unsur tersebut sangat berperan penting dalam kegiatan penin, karena dapat tercipta karena adanya komunikasi dan Jaringan sosial merupakan bentuk ketiga dari modal sosial.

Berikutnya bahwa upaya pengembangan pariwisata, Modal sosial yang secara umum merujuk pada norma-norma, jaringan dan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat dalam memperoleh akses kekuasaan dan sumber daya serta pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. yang berperan melalui: 1. Sharing information (berbagi informasi), 2. Coordinating activities (mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas) dan 3. Peran antar anggota kelompok dalam membuat keputusan bersama, sangatlah tepat digunakan agar kebijakan pengembangan yang berhubungan dengan kapasitas masyarakat dapat lebih bisa di gunakan, dan Bentuk Modal sosial dalam sosial Mapping untuk pengembangan pariwisata adalah : 1. Social bounding (perekat sosial), 2. Social bridging (jembatan sosial), dan 3. Social linking (hubungan/jaringan sosial)

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Untuk mencapai nilai yang baik mengenai pengelolaan pariwisata, disarankan agar penciptaan dan penguatan Modal sosial harus, dilaksanakan secara baik dan meningkatkan motivasi bagi anggota masyarakat dan para pemangku kepentingan
2. Dengan adanya penguatan pada kelompok masyarakat, maka para pelaku wisata dapat termotivasi dengan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata

E. Referensi

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: alfabeta.
- Alwini, A. F., & Herdiansyah, H. (2018). Urban Governance Management Towards Managing Slum Area in Indonesian Cities. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(2), 111-121.
- Arikunto. (1993). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Bawole, P. (2020). Pengembangan kampung kota sebagai salah satu alternatif tujuan wisata minat khusus. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 5(1), 121-132.
- Brata, J. T, Heber;Arisandi, (2019). The Scenario for Slum Handling in Kelurahan Kandari Kendari City, *Prosiding pada Seminar Internasional ICEASD 2019, April 01-02, Indonesia*, Copyright © 2019 EAI, DOI 10.4108/eai.1-4-2019.2287198, Hal -1
- Brata, J. T, dkk (2023). *Modal Sosial, Model Jaringan dan Konsep Pelayanan Publik*, CV. Rumah Bunyi, ISBN : 978-623-6760-21-5.
- Celep, C., & Yilmazturk, O. E. (2012). The relationship among organizational trust, multidimensional organizational commitment and perceived organizational support in educational organizations. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 46, 5763-5776.
- Dewi, M. P., & Rahyuda, A. G. (2015). Peran Pemeditasian Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Perceived Organizational Support Terhadap Intention To Leave. *EJurnal Manajemen Unud*, 4(10), 2928 - 2954
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. *Journal of Applied psychology*, 71(3), 500-507.
- Grootaert, C. (Ed.). (2004). *Measuring social capital: An integrated questionnaire* (No. 18). World Bank Publications.
- Hasbullah, J. (2006). *Social Kapital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta, MR-United Press.
- Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara.
- Koen Meyers. (2009). *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Jakarta: Unesco Office
- Nunik R. H. (2001). *Manajemen Pelayanan Publik Daerah, Dalam Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: CLOGAPPS Universitas Diponegoro
- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy* 6

(1), 65-78.

- Rudito, B., & Famiola, M. (2008). *Social mapping: Metode pemetaan sosial: Teknik memahami suatu masyarakat atau komunitas*. Rekayasa Sains.
- Sawitri, D., & Soepriadi, I. F. (2014). Modal sosial petani dan perkembangan industri di desa sentra pertanian Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(1), 17-36.
- Soetomo. (2006). *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sundaro, H. (2018). Identifikasi Kapasitas Kelembagaan Lokal Dalam Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan (Studi kasus: Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang). *Jurnal Riptek*, 12(1), 97-112.
- Supono, B. (2011). Peranan Modal Sosial Dalam Implementasi Manajemen Dan Bisnis, *Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.